

KONTESTASI MEREbut KEBENARAN AGAMA (Studi Analisa di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)

Khairil Umami

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
khairilumami@iainponorogo.ac.id

Arif Wibowo

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo
yiss.arif@gmail.com

Abstrak

Dalam sosiokultural masyarakat yang majemuk dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong atau pun adat istiadat, secara umum yang tampak dipermukaan tidaklah terdapat suatu persoalan yang berarti apa lagi sampai mengarah pada persoalan kontestasi. Hal inilah sepintas yang terlihat pada masyarakat di Kecamatan Jatipurno Wonogiri. Namun, realitanya di tengah keberagaman yang ada, baik keberagaman interen umat beragama ataupun antar umat beragama sering sekali ditemukan berbagai problem yang silih berganti baik yang berhubungan dengan persoalan individu, sosial kemasyarakatan maupun institusi. Persoalan pokok yang ingin peneliti ungkap terhadap keberagaman di Kecamatan Jatipurno adalah Persoalan Kontestasi dalam merebut kebenaran agama. Dalam penelitian ini penulis hendak menggungkap dua pokok persoalan. *Pertama*, bagaimana sosio-historis arena (*field*) masyarakat di kecamatan Jatipurno dalam memainkan perannya dalam merebut kebenaran agama. *Kedua*, bagaimana masing-masing kontestan memainkan *capital* simbol untuk menggapai sebuah *habitus* dalam sosial masyarakat. Untuk mengungkap kedua persoalan tersebut peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dari pemikiran Pierre Bourdieu dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil analisa menemukan bahwa walaupun secara sosio-historis masyarakat di Kecamatan Jatipurno berasal dari suku maupun ras yang sama, namun karena persoalan ideologi yang masuk berbeda – beda, para elite dan

anggotanya memiliki hasrat untuk mempertahankan eksistensi dan menambah jumlah komunitas organisasi keagamanya. Sebelum memainkan capital simbol masing-masing menggunakan arena, yang peneliti sederhanakan menjadi tiga yaitu; arena institusi, komunitas dan lembaga birokrasi Hal ini mereka gunakan secara terus menerus dengan serangkaian metode untuk membentuk suatu *habitus* dalam masyarakat yang pada akhirnya memainkan berbagai modal *capital* yang mereka miliki.

Kata Kunci: Kontestasi; Kebenaran Agama; Simbol Kapital.

Abstract

In a socio-cultural society that is pluralistic and still upholds the values of *gotong royong* or customs in general that appear on the surface, there is no problem that means anything else until it leads to the issue of contestation. This can be seen at a glance in the community in Jatipurno Wonogiri District. However, the reality is that in the midst of the existing diversity, both internal and inter-religious diversity, various problems are often found that alternate between individual, social and institutional issues. The main problem that researchers want to reveal about diversity in Jatipurno District is the issue of contestation in seizing religious truth. In this study, the author wants to reveal two main issues. *First*, how the socio-historical arena (field) of the community in Jatipurno sub-district plays its role in seizing religious truth. *Second*, how each contestant plays a capital symbol to reach a *habitus* in society. To uncovering these two problems, researcher used a sociological approach from Pierre Bourdieu's thinking with a qualitative type of research. From the results of the analysis, it can be seen that although socio-historically the people in Jatipurno District come from the same ethnicity and race, due to the different ideological issues involved, the elites and their members have a desire to maintain their existence and increase the number of their religious organization communities. Before playing the capital symbol, each uses the arena, which the researcher simplifies into three, namely; the arena of institutions, communities and bureaucratic institutions, they use this continuously with a series of methods to form a *habitus* in society which in the end they play with the various capitals they have.

Keyword: Contestation; Religious Diversity; Capital Symbol

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini berawal dari pengamatan beberapa tahun yang lalu ketika peneliti berdomisili di Kecamatan Jatipurno. Sepintas di Kecamatan Jatipurno ini dalam kehidupan sosial masyarakat memang tidak ada problem sosial apalagi problem agama.

Namun demikian, realita kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Jatipurno ini sangat beragam, salah satunya adalah persoalan agama. Hampir semua organisasi keagamaan, baik Islam maupun non-Islam terdapat di wilayah Jatipurno. Mulai dari NU, Muhammadiyah, LDII, Jaulah, MTA dan beberapa organisasi kejawen semisal *winareh*, *darmo gandul* dan berbagai aliran kepercayaan. Organisasi atau agama non Islam pun juga terdapat beberapa aliran semisal Kristen Katolik, Protestan, ataupun Kristen Gereja Jawa.

Persoalan berikutnya dalam anggapan sebagian besar masyarakat Jatipurno Wonogiri adalah organisasi keagamaan sering kali dianggap sebagai sebuah agama, sehingga kebenaran organisasi keagamaan memiliki posisi sederajat dengan kebenaran agama. Padahal jelas terdapat perbedaan yang mendasar antara agama dengan pemikiran agama (Wijaya, 2019: 54). Sayangnya oleh para elit tokoh organisasi keagamaan di Jatipurno, hal ini belum sepenuhnya disadari dan tetap memposisikan organisasi keagamaan dalam posisi pemikiran agama. Sehingga tidak mengherankan kalau ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam organisasi LDII, MTA, NU atau Muhammadiyah, ataupun dari organisasi selain Islam seperti kejawen. Setiap individu di Jatipurno dipolarisasikan secara tidak sadar, dan kalau individu sudah diketahui jati dirinya sebagai anggota dari organisasi keagamaan tertentu maka akan ada filter dan upaya menutup diri dari komunikasi-komunikasi yang menyangkut persoalan agama. Menutup diri ini bukan berarti sebagai bentuk saling menghargai atau menghormati melainkan sebagai bentuk penegasan bahwa individu tersebut memiliki agama dan ajaran yang berbeda. Sehingga wajah agama baik sesama Islam maupun antara Islam dengan Non Islam memiliki kecenderungan eksklusif.

Melihat sepintas persoalan tersebut di atas, tidak mengherankan kalau seringkali terjadi kontestasi sosial hampir di setiap lini kehidupan di Jatipurno. Beberapa indikasi awal yang peneliti ketahui di antaranya, persoalan hak guna masjid, percikan-percikan kata-kata bebas dalam masyarakat seperti, ormas LDII memandang NU yang tahlilan dianggap sebagai “konser”, sebaliknya NU memandang LDII “celananya kurang bahan”, karena memakai celana di atas mata kaki, dan beragam kata-kata lain yang sering terucap secara tidak sadar dalam beberapa kesempatan, seperti dalam ceramah maupun dalam relasi sosial. Efek dari adanya kontestasi ini adalah agama sebagai arena untuk menunjukkan dalam masyarakat bahwa ajaran organisasi agamanya yang paling benar.

Padahal kebenaran yang mereka usung belum tentu kebenaran agama namun sering kali mengatasnamakan agama.

Sebenarnya dalam konteks organisasi keagamaan di Indonesia banyak sekali para peneliti yang telah menggolongkannya dalam berbagai katagori. Seperti misalnya membaginya menjadi Islam Puritan, Muslim Nominal dan Muslim Nasionalis. Clifford Geerts, misalnya, mengategorikan masyarakat muslim menjadi tiga, yaitu Abangan, Priyayi dan Santri. Beberapa peneliti Indonesia mengkategorikannya menjadi beberapa kategori, misalnya, Ahsin wijaya membaginya membagi menjadi empat katagori yaitu, Sekuler, Formalistik, Pribumi dan Integralistik (Wijaya, 2019: 54).

Berbagai tipologi maupun argumen dibalik pengkategorian tersebut sudah banyak dikupas oleh para peneliti dengan berbagai sudut pandang analisa masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti tidak dalam posisi menambah kategori, maupun menyingkap argumen dari masing-masing organisasi. Namun yang menjadi fokus peneliti adalah mengungkap bentuk-bentuk kontestasi agama dalam realitas sosial masyarakat di Jatipurno Wonogiri. Dua fokus persoalan yang ingin peneliti ungkap adalah, *pertama* Bagaimana kondisi sosial-historis arena (*field*) tempat berlangsungnya kontestasi untuk merebut kebenaran agama di Kecamatan Jatipurno Wonogiri? Adapun fokus yang kedua adalah bagaimana masing-masing kontestan memainkan *capital simbol* dalam kontestasi berebut kebenaran agama di Kecamatan Jatipurno Wonogiri?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan paradigma definisi sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif *field reserch* (penelitian lapangan). Data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Karena sifatnya mendeskripsikan dan datanya verbal maka jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif (Moleong, 2004: 4). Secara umum sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu, *pertama* data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil interview/wawancara, observasi dan dokumentasi dengan berbagai kalangan dalam sosial masyarakat di kecamatan Jatipurno Wonogiri. *Kedua*, data sekunder yaitu berbagai literatur yang berkaitan dengan pemikiran Pierre Bourdieu terutama berkenaan dengan persoalan kontestasi. Metode pengumpulan data menggunakan berbagai metode mulai dari *interview*, yaitu metode pengumpulan data

yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan dari seseorang narasumber dengan percakapan dan berhadapan muka (Koentjoroningrat, 1989: 29).

Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, teknik observasi bersifat *observasi partisipan*, yaitu suatu proses pengamatan yang melibatkan diri baik sebagai peneliti maupun sebagai bagian dari kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Peneliti melibatkan diri dan terjun langsung di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat di Kecamatan Jatipurno Wonogiri. *Dokumentasi*, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Arikunto, 1999: 200) Pada tahapan analisa data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik. Tahapan analisis data berupa pengolahan, analisis, dan penafsiran dari berbagai data yang diperoleh mulai dari sebelum memasuki lapangan penelitian, selama dalam lapangan penelitian, dan setelah di lapangan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengungkap bagaimana model kontestasi di Kecamatan Jatipurno, peneliti menggunakan teori kontestasi yang dipelopori oleh Pierre Bourdieu sebagai pisau analisa. Terdapat beberapa istilah kunci untuk memahami kontestasi Bourdieu yakni *habitus*, *arena* dan *kapital*. *Field* (arena) dan *capital simbol* adalah unsur di dalam *habitus*. Penjelasan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Habitus

Bourdieu merumuskan konsep *habitus* sebagai nilai-nilai sosial yang dihayati manusia dan tercipta melalui sosialisasi nilai-nilai dalam waktu yang lama, sehingga menjadi cara berfikir dan pola perilaku yang menetap didalam diri manusia tersebut (Lechte, 2001 : 83). Lebih lanjut, Bourdieu mendefinisikan *habitus* sebagai berikut,

System of durable, transposable disposition, structured structures predisposed to function as structuring structures, that is, as principles of the generation and structuring of practices and representations which can be objectively regulated' and regular' without anyway being the product of obedience to rules, objectively adapted to their goals without presupposing a conscious aiming at ends or an expressastery of the operations necessary to attain them and, being all this,

collectively orchestrated without being the product of the orchestrating action of a conductor (Swatz, 2002: 169).

“Sistem disposisi yang bertahan lama, dapat berubah-ubah, struktur-struktur yang terstruktur berkecenderungan untuk berfungsi sebagai struktur-struktur yang mengalami proses penstrukturan, sehingga sebagai prinsip-prinsip penerusan dan penstrukturan praktik-praktik dan representasi-representasi yang dapat secara objektif “diatur” sekaligus “teratur” tanpa, dengan cara apapun, menjadi hasil (bentukan) sikap ketundukan terhadap berbagai aturan, yang secara objektif disesuaikan dengan tujuan-tujuan mereka tanpa perlu mensyaratkan upaya untuk mencapai tujuan secara sadar atau suatu ungkapan penguasaan atas tindakan-tindakan yang perlu ditempuh untuk meraihnya dan, dengan ini semua, secara kolektif diorkestrasikan tanpa perlu menjadi hasil dari pengorkestrasian oleh seorang konduktor” (Swatz, 2002: 69).

Dalam bahasa lain Ritzer menyebutkan *habitus* sebagai “struktur mental atau kognitif” yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Aktor dibekali serangkaian skema yang diinternalisasikan untuk merasakan, memahami, menyadari dan menilai dunia sosial. Melalui pola-pola itu aktor memproduksi tindakan mereka dan juga menilainya. Secara dialektis, *habitus* adalah “produk internalisasi struktur” dunia sosial. *Habitus* menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Dalam satu hal, *habitus* adalah “struktur yang menstruktur” (*structuring structures*). Maksudnya, *habitus* adalah sebuah “struktur yang menstruktur” kehidupan sosial. Sedangkan dalam sisi yang lain, *habitus* adalah “struktur yang terstruktur” (*structured structure*), yaitu struktur yang distrukturisasi oleh dunia sosial (Kresdinanto, 2014: 199).

2. *Field* (Arena)

Ketika membicarakan tentang *habitus*, maka tidak bisa dipisahkan dari *field* (arena). Keduanya saling mengandaikan hubungan dua arah: struktur-struktur objektif (struktur-struktur bidang sosial) dan struktur-struktur *habitus* yang telah terintegrasi pada perilaku. *Habitus* ada dalam pikiran aktor, sedangkan arena berada di luar pikiran aktor. Bourdieu sendiri mendefinisikan arena sebagai berikut ;

In analytic terms, a field may be defined as a network, or a configuration, of objective relations between positions. These positions are objectively defined, in their existence and in the determinations they impose upon their occupants, agents or institutions, by their present and potential situation (situs) in the structure of the distribution of species of power (or capital) whose possession commands access to

the specific profits that are at stake in the field, as well as by their objective relation to other positions (domination, subordination, homology, etc), (Swatz, 2002: 171).

“Dalam terminologi analitik, sebuah arena bisa didefinisikan sebagai sebuah jaringan, atau konfigurasi, hubungan-hubungan objektif antar berbagai posisi. Posisi didefinisikan secara objektif, dalam keberadaannya dan dalam determinasi-determinasi yang dipaksakannya kepada mereka yang menempatnya, yaitu agen dan lembaga, oleh situasi aktual dan situasi potensial dalam struktur pembagian kekuasaan (atau modal) di mana kepemilikan atas kekuasaan (atau modal) membuka akses ke dalam suatu keuntungan yang menjadi taruhan dalam arena, sebagaimana juga dalam relasi objektifnya dengan posisi-posisi lainnya (dominasi, subordinasi, homologi, dll)” (Kresdinanto, 2014: 214).

Konsep arena ini pada dasarnya merupakan panggung bagi sebuah kontestasi kuasa-kuasa untuk mempengaruhi orang lain dalam memperebutkan dominasi. Dalam perspektif Bourdieu, agen-agen tidak bertindak dalam ruang hampa, melainkan dalam situasi-situasi sosial konkret yang diatur oleh seperangkat relasi sosial yang objektif. Menurut model teoritis Bourdieu, pembentukan sosial apapun distrukturkan melalui serangkaian arena yang terorganisasi secara hirarkis (arena ekonomi, pendidikan, politik, sastra dan sebagainya).

3. Capital (Modal)

Konsep kapital merupakan bagian penting dalam konsep Bourdieu yang integral dalam konsep *field* (arena). *Capital* merupakan aset yang dimiliki individu dalam lingkungan sosialnya. Ketika berbicara modal, Bourdieu mengembangkan konsepnya sendiri secara menarik. Dia berangkat dari pemikiran, kepentingan atau sumber daya yang dipertaruhkan tidak selalu berbentuk materi.

Bourdieu membagi beberapa jenis *capital* yang seringkali berada dalam konsep *field* (arena), antara lain: ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Pertama, *capital economi* mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah buruh) materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, *capital budaya* mencakup keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Misalnya kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda budaya bernilai tinggi dan pengetahuan. Ketiga, *capital sosial*

menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungan dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Keempat, *capital simbolis* mencakup segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi (Richardson, 1986: 22).

Bagaimana relevansi teori di atas dengan penelitian ini? *Field* (arena) kami gunakan untuk menjawab sub rumusan yang pertama berkenaan tentang sejarah kondisi sosial di tempat yang peneliti maksud. Sejarah ini mencakup peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi dalam kurun waktu tertentu yang menyangkut politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Sementara untuk *capital simbol* peneliti gunakan untuk menjawab sub rumusan yang kedua. Dalam hal ini akan ditelusuri cara-cara masing-masing kelompok agama menggunakan simbol tertentu dalam rangka untuk menjadi dominan. Simbol ini bisa berupa wacana (*discourse*), program ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Simbol tersebut merupakan modal (*capital*) dalam rangka berkontestasi antar masing-masing kelompok agama.

Berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung maka dapat diperoleh suatu analisa bahwa; *pertama* secara sosio-historis *field* (arena) dalam memainkan simbol kontestasi dalam merebut kebenaran agama yang terdapat di kecamatan Jatipurno, baik keragaman antar umat beragama maupun intern umat beragama, dilihat secara sepintas maka sulit rasanya untuk menemukan berbagai bentuk simbol yang mengarah pada sebuah kontestasi. Karena hampir setiap simbol maupun kegiatan-kegiatan sosial masyarakat selalu dalam kemasan yang baik dan seolah tidak menonjolkan makna kontestasi yang negatif. Terlebih lagi dewasa ini pada 2019 telah dibentuk sebuah forum yang diberi nama HUIJ (Himpunan Umat Islam Jatipurno). Forum yang dipromotori langsung oleh Bupati Wonogiri dengan bekerja sama dengan Forkompinca (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Kecamatan Jatipurno ini seolah sebagai sebuah solusi di atas berbagai bentuk benturan-benturan yang biasa terjadi dalam sosial masyarakat kendati benturan tersebut tidak selalu berupa fisik.

Namun pada beberapa momen, akan sangat mudah ditemukan beberapa bentuk sindiran-sindiran yang mengarah pada kontestasi. Misalnya dalam masalah takziah atau *melayat* kendati para warga masyarakat ikut hadir dalam melayat. Akan sangat mudah ditemukan klasifikasi siapa dan orang dari kelompok mana yang meninggal, dan cerminan sikap itulah gambaran simbol yang tampak dalam prosesi takziah sampai pemakaman. Bahkan kejadian semacam ini menjadi buah bibir dalam sosial masyarakat

beberapa hari ke depan, misalnya soal tata cara perawatan jenazah, *selamatan* atau tidak, peringatan 3, 7, 40 harian atau tidak dan berbagai persoalan lain yang akan selalu menjadi sorotan. Belum lagi terhadap persoalan *Walimatulursy* (resepsi pernikahan) di mana dalam kelompok tertentu memiliki anggapan bahwa kalau belum dinikahkan oleh seorang ustaz atau tokoh yang sama dengan organisasi keagamaannya maka akan dianggap kurang *afdal* (utama) bahkan belum sah.

Berbeda lagi dalam urusan pendidikan. Setelah anak memasuki usia pendidikan, maka akan dilanjutkan ke mana atau organisasinya apa, selalu mencuri perhatian dan buah bibir dalam masyarakat, dan rata-rata pemahaman yang sesuai dengan organisasi keagamaannya lah yang selalu dijadikan tolak ukur sebagai sebuah katagori ideal. Maka sepintas HUIJ (Himpunan Umat Islam Jatipurno) seolah angin segar dalam mengatasi berbagai bentuk problematika dalam sosial masyarakat. Secara formal jawabannya mungkin adalah “iya”, karena ini bisa jadi menjadi solusi ketika terjadi pertikaian antar berbagai umat beragama yang ada. Namun, kenyataannya dalam tataran praktik hal tersebut tidaklah demikian. Masyarakat Islam di Jatipurno memang bisa dikategorikan mayoritas, namun bukan berarti boleh menafikan agama lain yang dalam kategori minoritas. Padahal dalam pembentukan forum tersebut yang dilibatkan adalah beberapa unsur mulai dari Forkompinca, tokoh agama, tokoh organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan. Semestinya dengan tanpa maksud menafikan yang minoritas dengan keberagaman yang ada forum ini akan lebih akomodatif kalau menjadi FKAUB (Forum Komunikasi Antar Umat beragama).

Di lain pihak berbagai tokoh struktural yang menjabat dalam forum tersebut juga akan menjadi perhatian para pengikut di bawahnya. Kendati tidak secara vulgar, publik figur di berbagai lini dalam wilayah Kecamatan Jatipurno sering kali dijadikan barometer sebuah kemajuan dalam berbagai aspek, baik kemajuan agama, pendidikan ataupun ekonomi dan barometer tersebut menjadi amunisi untuk menarik simpati individu di luar golongannya. Hal ini sebagaimana yang dilontarkan oleh Bapak Sular (salah satu tokoh masyarakat Jatipurno).

Terlebih lagi tokoh yang terpilih sebagai ketua dari forum ini adalah Bapak H Suroto dimana beliau adalah Tokoh dari pengurus LDII yang secara tidak langsung memberikan pesan bahwa LDII kecamatan Jatipurno sebagai organisasi yang berupaya memepererat atau merajut kebersamaan di tengah keberagaman yang ada. Dengan

demikian menurut pandangan peneliti dengan apa yang disampaikan Bapak Sular merupakan sebuah representasi dari penghayatan subjektif akan keagamaannya, yang mana, kendati dalam lingkup sosial masyarakat seolah bersama-sama namun, sebenarnya tetap terjadi pertarungan antar pemahaman yang masuk sesuai kognisi dari pemahaman masing-masing, baik berhadapan dengan agama lain ataupun berhadapan dengan sesama Islam namun berbeda ideologi.

Berbagai hal tersebut seyogyanya menjadi perhatian bersama sehingga arah perjuangan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama tidak sebatas formalitas belaka. Hal ini terbukti ketika peneliti mengikuti acara tahlilan tujuh hari di rumah *Lek Yudi* (*Lek*: sebutan akrab masyarakat memanggil warganya) di Desa Tawangrejo, di mana di daerah tersebut kebetulan juga terdapat beragam warga dari berbagai kalangan. Ada yang Budha, maupun Islam, Ada yang berfaham organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah, MTA, ataupun LDII. Ketika undangan dari organisasi NU datang untuk menyelenggarakan acara tahlil tujuh hari, dengan tidak sengaja peneliti mendengarkan lontaran ekspresi dari salah seorang organisasi LDII dengan sebuah lontaran bahasa jawa yang menyebutkan "*kae penyanyine wes teko*"(itu penyanyinya sudah datang). Sebutan penyanyi bagi orang-orang yang akan menyelenggarakan tahlil dalam perspektif penulis merupakan ekspresi dari perasaan tidak senang akan kebiasaan dari tradisi tersebut. Bukti lain dari fakta ini adalah bahwa kendati mereka datang namun tidak bertempat di dalam rumah melainkan bertempat diluar rumah dan bergerombol bersama dengan warga lain yang satu pemahaman ideologinya.

Begitu pula pada saat acara tahlil berlangsung. Warga yang di dalam rumah menyimak atau sebagian menirukan, bagi yang tidak, paling tidak diam mendengarkan. Akan tetapi pemandangan di luar rumah berbalik sampai Ustaz Agus (selaku pemimpin kegiatan tahlil) berhenti sejenak di tengah tahlilnya. Ini ia lakukan sebagai bentuk ekspresi toleransi.

Persoalan-persoalan seperti gambaran di atas hampir terjadi dalam setiap lini kehidupan, mulai dari acara sosial semacam; walimah, takziah, khitan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya, hingga sampai pada persoalan pendidikan dan ekonomi yang secara selektif akan memilih warung ataupun lembaga pendidikan yang sejalan dengan ideologi organisasi keagamaannya. Dari sini dapat dipahami bahwa berbagai kegiatan sosial kendati secara praktik dapat dilaksanakan bersama-sama dari beragam agama dan

organisasi keagamaan, namun sejatinya bukan sebagai arena untuk menyampaikan kebenaran agama kelompok tertentu, melainkan panggung arena untuk menarik simpati warga lain dengan maksud para warga yang belum terafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu merasa tertarik dan mengikuti organisasi agamanya. Dengan bahasa lain kegiatan sosial, maupun agama tak lain adalah panggung arena untuk merebutkan sebuah makna kebenaran.

Berbagai bentuk kegiatan sosial seolah-olah dilakukan bersama-sama untuk kebersamaan namun sejatinya sebagai arena untuk memanggungkan eksistensi dari masing-masing organisasi keagamaannya. Dari sini dapat dipahami bahwa *habitus* kontestan muslim bisa dimainkan. Pertanyaannya adalah bagaimana dalam keberagaman yang begitu majemuk dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang begitu banyak, masing-masing dapat mengambil peluang dan dapat menggunakan kapitalnya dengan sebaik-baiknya.

Dilihat dari sisi jumlah rumah ibadah di Kecamatan Jatipurno, terdapat sekitar 111 masjid dan 14 surau atau mushola, 1 gereja dan 1 wihara. Dari sekian jumlah masjid dan mushola, rata-rata di masing-masing desa atau kelurahan digunakan berbagai organisasi agama, baik itu LDII, NU, Muhammadiyah, MTA maupun Khuruj. Dengan demikian, NU memiliki masjid sendiri, LDII memiliki masjid sendiri dan Muhammadiyah memiliki masjid sendiri. Hanya MTA dan Majelis Khuruj yang tidak memiliki masjid hal ini dapat dilihat karena secara kuantitas jumlah mereka masih sedikit.

Antara NU, Muhammadiyah dan LDII dalam persoalan peribadatan di Kecamatan Jatipurno menjadi persoalan yang *privat* (hanya sesama anggota), dan hampir tidak mungkin mereka mengadakan suatu rangkaian ibadah seperti salat jumat, ataupun salat berjamaah, majlis ilmu di satu masjid secara bersamaan meskipun berdekatan. Dari sini masing-masing masjid sudah memerankan *capital simbol* masing-masing basis organisasinya. NU akan bangga kalau takmirnya adalah alumni dari pesantren, LDII akan bangga kalau takmirnya berasal dari individu yang ekonominya mapan dan rajin atau tepat waktu dalam beribadah, sementara Muhammadiyah akan bangga kalau takmirnya adalah sarjana atau kalangan yang berpendidikan dan mempunyai wawasan yang luas. Sementara dua aliran keagamaan yang tidak memiliki masjid secara kelembagaan mereka akan bangga kalau melaksanakan salat tepat waktu dan rajin salat berjamaah.

Sementara untuk menggungkap modus *capital* simbolik pada masing-masing kontestan organisasi keagamaan di Kecamatan Jatipurno, sebagaimana peneliti sampaikan bahwa dalam setiap *field* (arena) dalam permainan politik selalu membutuhkan kapital sebagai modal kontestasi mereka. Setidaknya Bourdieu membagi berbagai bentuk kapital dalam beberapa kategori, baik dalam kapital ekonomi, budaya, sosial maupun kapital simbolik.

Sebelum lebih lanjut diuraikan bagaimana masing-masing kontestan menggunakan modal kapitalnya, berdasarkan data-data primer yang peneliti peroleh dari wawancara dengan beberapa warga di Kecamatan Jatipurno serta observasi langsung atas berbagai aktifitas yang dilakukan oleh berbagai organisasi keagamaan, kontestasi antar sesama umat Islam dalam menyikapi perbedaan organisasi keislamannya lebih terasa kontestasinya dibandingkan dengan kontestasi antar umat beragama. Hal ini bisa jadi karena warga masyarakat yang memeluk agama selain Islam merupakan kelompok minoritas sehingga keberadaannya tidak begitu penting untuk menopang eksistensi organisasi.

Secara umum *field* (arena) tempat kontestasi berlangsung dalam penelitian ini adalah arena kegiatan sosial masyarakat di Kecamatan Jatipurno dalam memainkan perannya. Kontestan yang menonjol adalah LDII, NU, Muhammadiyah, dan MTA karena prosentase mereka secara jumlah lebih banyak. Kegiatan sosial masyarakat yang peneliti maksud secara lebih spesifik dapat diidentifikasi menjadi paling tidak tiga basis utama sebagai arena (*field*) untuk berkontestasi, ketiga basis tersebut adalah arena yang berbasis institusi, komunitas dan lembaga pemerintahan (birokrasi).

Ketiga basis arena tersebut tersebar dalam level-level kelas sosial dalam arena masing-masing yang tersebar di Kecamatan Jatipurno. Arena yang berbasis institusi meliputi masjid, musala, rumah dan sekolah-sekolah formal, mulai dari PIAUD sampai sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tingkat lanjut. Selain itu juga terdapat basis institusi yang berlabel madrasah semisal pengajian sore hari ataupun pesantren. Baik LDII, NU maupun Muhammadiyah di Kecamatan Jatipurno, rata-rata masjid sering diadakan mejelis sebagai upaya untuk mempertajam ideologi organisasinya yang sifatnya tertutup dan hanya dapat diikuti oleh mereka yang berasal organisasi keagamaan yang sama.

Proses perjuangan di arena masjid berlangsung dengan berbagai metode mulai dari ceramah, diskusi, kajian, ataupun pengkajian kitab yang mereka lakukan secara rutin dan terjadwal. Selain arena masjid atau musala, arena yang tidak kalah menarik adalah rumah. Masing-masing organisasi keagamaan juga membuat beragam kegiatan yang dikemas dalam kegiatan silaturahmi. LDII mempunyai program ngaji *manqul* dengan kitab tertentu yang sudah ditentukan dengan catatan ketika hadir dalam kajian harus bersama seluruh anggota keluarga mulai dari yang paling kecil sampai dewasa.

Hal ini sekaligus menimbulkan kesan bahwa orang-orang warga LDII terkesan ringan dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* karena melibatkan semua anggota keluarga sehingga kalau mendengarkan fatwa diasumsikan semua anggota keluarga juga akan mendengarkannya sehingga tahapan untuk menggapai keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah* akan tergapai. Untuk mengimbangi kegiatan tersebut, NU juga membuat konsep yang serupa dalam bingkai tahlil keliling yang didalamnya diisi kajian kitab kuning dengan mendatangkan ustaz dari pesantren. Tak mau ketinggalan, MTA dan Muhammadiyah juga memiliki kegiatan serupa secara terjadwal, hanya istilahnya yang berbeda yakni dengan istilah kajian keislaman.

Institusi yang menarik adalah sekolah formal baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Melalui berbagai anggota yang terkadang juga seorang pendidik, masing-masing organisasi secara tidak sadar akan melakukan klasifikasi mana anak atau peserta didik yang memiliki ideologi yang sama. Metode yang mereka gunakan sangatlah beragam mulai dari cara formal maupun non formal. Secara formal tak jarang guru memberikan sisipan ideologis sesuai dengan pemahaman organisasi keagamanya. Secara non formal biasanya dilaksanakan semacam kajian Islam dengan mendatangkan pemateri dari luar sekolah. Pihak penyelenggara dengan selektif akan memilih da'i atau ustaz yang memiliki ideologi yang sama dengan pengundangnya. Materi dan tema tidak lagi menjadi perhatian utama akan tetapi yang diprioritaskan adalah latar belakang dan afiliasi organisasi keislaman.

Berikutnya adalah arena yang berbasis birokrasi (pemerintahan), dengan adanya beberapa pejabat pemerintah di kantor-kantor pemerintahan yang mereka identifikasi dari acara-acara silaturahmi. Akhirnya mereka menggunakan lobi-lobi pemerintahan berdasarkan organisasi keagamanya yang akan mendapatkan layanan prioritas baik dalam bidang layanan maupun proyek-proyek pedesaan. Cara yang mereka gunakan

adalah dalam bingkai kerjasama ataupun dalam bingkai transformasi gagasan tentang persoalan sosial kemasyarakatan. Metode dan arena ini dirasa sangat efektif dan mereka secara tidak langsung akan mengenalinya melalui simbol yang dipakai mulai dari simbol bahasa, baik bahasa tubuh maupun pakaian kedinasan.

Berdasarkan identifikasi dari arena masing-masing, maka pertanyaan kritis selanjutnya adalah kemana muara atau tujuan akhir dari masing-masing organisasi keagamaan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti mencoba melakukan beberapa analisa dalam konteks kontestasi Pierre Bourdieu. *Pertama* mereka merasa yang paling *ahli sunah wal jama'ah* sehingga merasa paling dapat menyelamatkan warga masyarakat yang awam dari ideologi selainnya untuk mengikuti konsep pemikiran dan ideologinya. Ini merupakan bagian dari dakwah Islam dan bagian dari *fastabiqul khairat* sebagai simbol reproduksi *habitus* dalam sosial masyarakat. Maka *locus* perjuangannya berupa simbol gaya hidup, kepemilikan kelas, dan kuasa simbolik.

Ketiga simbol tersebut saling berkorelasi dan direpresentasikan dalam bingkai dakwah, *fastabiqul khairat*, dan unsur politik tertentu. Hal ini mereka lakukan untuk mengubah paradigma atau nalar individu masyarakat yang masih awam dan belum terafiliasi pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan sunah nabi dan berlandaskan Alquran dan Hadis, agar pada akhirnya terbentuk nalar homogen atau homogenitas *habitus* pada masyarakat. Tak lain motifnya adalah untuk kuasa golongan.

Analisa lainnya adalah, bahwa dengan adanya berbagai kegiatan dan metode dalam berbagai arena tersebut akan merubah gaya hidup dan kepemilikan kelas sosial. Pada saat-saat tertentu berbagai kekuatan ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan praktis dalam menopang kepentingan politis dan kekuasaan. Setelah arena dan muara akhir tersebut terpenuhi maka masing-masing akan memainkan modal (*capital*) ekonomi, budaya, sosial maupun capital simbolik.

IV. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas tentang bagaimana kontestasi merebut kebenaran agama di Kecamatan Jatipurno, Wonogiri, dan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Secara spesifik berbagai arena sosial masyarakat dapat dijadikan arena kontestasi atas nama ajaran agama, yang tidak selalu murni untuk berdakwah atau menegakkan

ajaran agama. Hal ini dapat dirasakan bukan saja di antarara umat beragama melainkan juga antara sesama umat Islam. Salah satu indikatornya adalah terbentuknya FUIJ (Forum Umat Islam Jatipurno), yang dipelopori oleh organisasi keagamaan yang berstatus mayoritas di dalam masyarakat Jatipurno, sehingga forum ini seolah menjadi *habitus* dalam struktur kognitif masyarakat dan sebagai tolak ukur dalam menghadapi persoalan sosial tetapi dalam realitanya justru tidak seperti yang diharapkan (menyelesaikan persoalan sosial) melainkan hanya sebagai formalitas dalam terbentuknya sebuah forum keislaman.

Selanjutnya bagaimana kontestan, yang dalam hal ini adalah berbagai organisasi keagamaan utamanya Islam, dalam memainkan *capital simbol*, ialah dengan memanfaatkan arena-arena sosial yang secara spesifik peneliti simpulkan terbagi dalam tiga ranah atau arena yaitu, institusi, termasuk di dalamnya rumah/keluarga, komunitas dan lembaga birokrasi (pemerintahan), dan dalam masing-masing ranah tersebut para kontestan baik NU, Muhammadiyah, LDII, MTA, ataupun Majelis Khuruj, menggunakan kontestasi ideologis dengan bingkai ceramah, diskusi, kajian ataupun pengajian kitab yang mereka lakukan secara rutin dan konsisten dengan dalih dakwah, meluruskan aqidah ahli sunah, dan *fastabiqul khairat*. Berbagai arena (*field*) tersebut terus mereka manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka mereproduksi *habitus* dalam sosial masyarakat yang mana *locus* kontestasinya berupa simbol, gaya hidup, kepemilikan kelas, dan kuasa simbolik. Dari sinilah para kontestan kemudian memainkan kapital di hampir semua lini kehidupan sosial, mulai dari kapital ekonomi, budaya, sosial ataupun kapital simbolik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bourdieu, Pierre. 1996. *Distinction: A Social Critique Of The Judgement Of Taste*. Translated by Richard Nice, USA: Harvard University Press.
- Endrastiti, Fini, Diah. 2016. "Kontestasi Identitas Perempuan Bercadar pada Komunitas Salafiyah" dalam Tesis, Jakarta, Universitas Mercu Buana.

- Fashri, Fauzi. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Juxtapose.
- Fherastama, Yopinovali, dkk. 2018. “Kontestasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus di Lembaga Dakwah Kampus Universitas Brawijaya”, dalam *Jurnal Kajian-Ruang Sosial Budaya*, Malang, Universitas Brawijaya, Vol 2, No 2.
- Khoirul Fata, Ahmad. 2018. “Membaca Polarisasi Santri dalam Kontestasi Pilpres 2019”, dalam *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Tulung Agung, Vol 18, No 2.
- Koentjoroningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Lechte, John. 2001. *50 Filsuf Kontemporer*, Yogyakarta: Kanisius.
- Lexy, J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nanang, Kresdianto. 2014. “Perre Bourdieu Sang Juru Damai”, dalam *Jurnal Kanal*, Vol 2, No 2, Surabaya.
- Richardson, J. 1986. *Form Of Capital Pierre Bourdieu. Handbook of Theory And Research For Sociology Of Education*, Westpot CT: Greenwood.
- Ritzer, George, & Goodman .2012. *Teori Sosiologi Klasik-Post Modern Edisi Terbaru* Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ritzer, George. 2012. *Teri Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern Edisi Kedelapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sumarno, dkk. 2013. “Orientasi Modal Sosial dan Modal Kultural di Fakultas Ilmu Pendidikan U.N.Y.”, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 6 No. 2, September.
- Swartz, David, I. 2002. “*The Sociology Of Habit: The Perspective Of Pierre Boerdieu*”, *The Occupational Therapy Journal Of Research*. Volume 22, Winter.
- Swartz, David. 1997. *Culture and Poer : the Sociology of Pierre Bourdieu*, Chicago: The University of Chicago.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sular, Warga Kecamatan Jatipurno, pada 16 Juli 2020, pukul 16.30 WIB.
- Wijaya, Aksin. 2019. *Kontestasi Merebut Kobenaran Islam di Indnesia (Dari Berislam Secara Teologis ke Berislam Secara Humanis*, Yogyakarta: Ircisod.
- Yudha, Karnanta. 2015. “Sastra ”Mungkin” : Kontestasi Simbolik Andrea Hirata dalam Arena Sastra Indonesia”, dalam *Jurnal Poetika*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Vol 3, No 2.
- Zuhriah. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.